



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Mekanisme Koordinasi Antara Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Bandung dengan Dinas Perhubungan
Kota Bandung dalam Mewujudkan
“Bandung Smart City”**

Skripsi

Oleh

Laras Hariesta

2013310051

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Mekanisme Koordinasi Antara Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Bandung dengan Dinas Perhubungan
Kota Bandung dalam Mewujudkan
*“Bandung Smart City”***

Skripsi

Oleh

Laras Hariesta

2013310051

Pembimbing

Dr. Ulber Silalahi, M.A.

Bandung

2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Laras Hariesta

NPM : 2013310051

Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Mekanisme Koordinasi Antara Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Bandung Dengan Dinas Perhubungan
Kota Bandung Dalam Mewujudkan “*Bandung Smart
City*”

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, Juli 2019

Laras Hariesta

ABSTRAK

Nama : Laras Hariesta

NPM : 2013310051

Judul : Mekanisme Koordinasi Antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dengan Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam Mewujudkan “*Bandung Smart City*”

Penelitian ini berjudul “Mekanisme Koordinasi Antara Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandung Dengan Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Mewujudkan “*Bandung Smart City*” “. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan juga memahami mekanisme koordinasi yang terjadi diantara kedua dinas. Teori mekanisme koordinasi dalam penelitian ini menggunakan teori yang dicetus oleh Henry Mintzberg.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 20 orang responden yang terdiri dari 12 pegawai dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dan 8 pegawai dari Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang dimana untuk mengetahui mekanisme koordinasi yang ditampilkan oleh kedua dinas. Teknik pengumpulan data berupa kuesioner, dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme koordinasi yang terjadi pada kedua dinas sama-sama tinggi dan juga tidak ditemukannya perbedaan dari kedua dinas tersebut terhadap mekanisme kordinasi yang dilakukan untuk mewujudkan *Bandung Smart City*.

Kata kunci: koordinasi, Mekanisme Koordinasi, Henry Mintzberg.

ABSTRACT

Name : Laras Hariesta

NPM : 2013310051

Title : *Coordination mechanism between Bandung city's Communication and Informatics service with Bandung city's Department of Transportation in realizing "Bandung Smart City"*

This study is titled "Coordination mechanism between Bandung city's Communication and Informatics service with Bandung city's Department of Transportation in realizing "Bandung Smart City" ". The aim of this study is to perceive and to understand the coordination mechanism that is occurring between the two public departments. The Coordination mechanism theory in this study uses a theory by Henry Mintzberg.

The samples that are used for the study are 20 respondents and it consists of 12 Bandung city Communication and Informatics service employees and 8 Bandung city Transportation department employees.

This study uses quantitative data analysis with descriptive type of research in which to perceive the coordination mechanism displayed by the two public service departments. The technique of data collection is a questionnaire and interview.

Based on the results achieved, it's concluded that the coordination mechanism occurring between the two public service departments are equally high and no differences were found from the two public service departments toward the coordination mechanism made to realize Bandung Smart City.

Keyword: Coordination, Coordination Mechanism, Henry Mintzberg.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan karunian-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian skripsi dengan judul “ Mekanisme Koordinasi Antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Dengan Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Mewujudkan “*Bandung Smart City*”. Penelitian ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 (sarjana) Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penelitian ini tentunya penulis menemui berbagai kesulitan dan tantangan yang dialami, Namun berkat dukungan serta bimbingan yang diperoleh dari banyak pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Begitu banyak ilmu dan pengalaman yang telah diperoleh penulis dari berbagai pihak, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan dan selaku dosen wali penulis.
2. Tutik Rachmawati, S.IP., MA., Phd. selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.

3. Dr. Ulber Silalahi, M.A. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan masukkan dalam penyusunan penelitian ini.
4. Kepada Ibu Gina, Mas Sakti, Bapak Meindy, Bapak Hubertus, Ibu Ani, Bapak Gandhi, Ibu Nia dan Seluruh Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan, yang telah banyak membantu penulis dalam mendukung kegiatan perkuliahan selama ini.
5. Kepada seluruh pihak dinas yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu untuk membantu peneliti dalam melakukan pengambilan data baik itu dari DISKOMINFO dan juga DISHUB.
6. Untuk nyonya besar dan keluarga inti yang selalu memberikan doa serta dukungan baik moral ataupun materi kepada penulis untuk menyusun skripsi.
7. Isaac Gabriel Mondy S.Ab selaku teman dekat penulis yang telah senantiasa memberikan waktunya, perhatiannya, arahnya kepada penulis selama studi di Universitas Katolik Parahyangan.
8. Teman-teman terdekat selama kuliah Fiona, Thessa, Putri, Patrisia, Clarissa, Frisca, Sabrina yang menemani penulis ketika perkuliahan dimulai dari hari pertama.
9. Teman-teman Ilmu Administrasi Publik angkatan 2013 yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dari pertama.

10. Teman-teman Unpar 2013 Dipta, Jason, Alisa, Mikky, Tasya, Alfrey, Syahreza, Aldo, Bulan dan teman-teman 2013 yang tidak bisa disebutkan satu per-satu.
11. Novita selaku barista Café Coffee Cult yang selalu membantu dan menyemangati penulis ketika penulis mengalami kesulitan.
12. Fidia Aziza selaku teman penulis selama mengerjakan skripsi.
13. Mas Sulis yang dengan senantiasa membantu penulis.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan penelitian ini masih banyak kekurangan serta kelemahan dikarenakan keterbatasan ilmu, saran serta kemampuan penulis dalam meneliti. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang membaca penelitian ini akan sangat membantu penulis di masa yang akan datang, namun besar harapan penulis agar penelitian dapat memberikan manfaat atau wawasan baru bagi pembaca. Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa akan selalu melimpahkan dan memberikan masukan semua pihak yang telah mebantuu dan memberikan dorongan dukungan kepada penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Bandung, 22 Juni 2019

penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
BAB II RANCANGAN PENELITIAN.....	10
BAB III KERANGKA TEORITIK.....	13
3.1 Pengertian Mekanisme Koordinasi Dalam Teori Organisasi.....	13
3.2 Tipe – Tipe Koordinasi	16
3.2.1 koordinasi Internal	16
3.2.2 Koordinasi External	17
3.3. Mekanisme Koordinasi	18
3.3.1 Mutual Adjustment	20
3.3.2 <i>Direct Supervision</i>	20
3.3.3 <i>Standardization Of Work Processes</i>	21
3.3.4 <i>Standardization Of Work Output</i>	21
3.3.5 <i>Standardization Of Skills</i>	22
3.4 Model Teoritik Mekanisme Koordinasi.....	22
BAB IV METODE PENELITIAN.....	23
4.1 Populasi dan Sampling.....	23
4.2 Pengukuran	24
4.2.1 Definisi Operasional	24
4.2.2 Operasionalisasi Variabel	24

4.2.3	Skala Pengukuran dan Teknik Penskalaan	27
4.2.4	Uji Validitas dan Reliabilitas	28
4.2.4.1	Uji validitas	28
4.2.4.2	Uji Reliabilitas	32
4.3	Pengumpulan data	35
4.4	Analisis Data	36
BAB V HASIL PENELITIAN PENELITIAN TENTANG MEKANISME		
KOORDINASI ANTARA DINAS KOMUKASI DAN		
INFORMATIKA KOTA BANDUNG DENGAN DINAS		
PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG DALAM MEWUJUDKAN		
<i>BANDUNG SMART CITY</i>.....		
		39
5.1	Karakteristik Responden	39
5.2	Deskripsi Mekanisme Koordinasi Antar Dinas Komunikasi dan	
	Informatika Kota Bandung dengan Dinas Perhubungan Kota	
	Bandung dalam Mewujudkan <i>Bandung Smart City</i>	44
5.2.1	<i>Mutual Adjustment</i>	44
5.2.2	<i>Direct Supervision</i>	47
5.2.3	<i>Standardization Of Work Processes</i>	51
5.2.4	<i>Standardization of Work Outputs</i>	55
5.2.5	<i>Standardization Of Worker Skills</i>	58
5.2.6	Indeks Mekanisme Koordinasi di DISHUB dan	
	DISKOMINFO.....	62
BAB VI PEMBAHASAN TENTANG MEKANISME KOORDINASI		
ANTARA DINAS KOMUKASI DAN INFORMATIKA KOTA		
BANDUNG DENGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA		
BANDUNG DALAM MEWUJUDKAN <i>BANDUNG SMART CITY</i>		
		65
6.1	<i>Mutual Adjustment</i>	65
6.2	<i>Direct Supervision</i>	67
6.3	<i>Standardization of Work Processes</i>	69
6.4	<i>Standarization of Work Outputs</i>	72
6.5	<i>Standardiztion of Worker Skills</i>	74

6.6 Mekanisme Koordinasi	76
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	78
7.1 Kesimpulan	78
7.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Operasionalisasi Variabel.....	25
Tabel 4.2	Kategori Jawaban Responden	28
Tabel 4.3	Rekapitulasi Hasil Pengujian Validitas	31
Tabel 4.4	Pedoman Menentukan Tingkat Keandalan Instrumen Ukuran dari Cronbach	34
Tabel 4.5	Rekapitulasi Hasil Pengujian Reliabilitas	34
Tabel 5.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	40
Tabel 5.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Pangkat/Golongan	41
Tabel 5.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjabat	41
Tabel 5.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 5.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	42
Tabel 5.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Agama.....	43
Tabel 5.7	Distribusi Frekuensi <i>Mutual Adjustment</i>	45
Tabel 5.8	Skor Kategori Tinggi, Sedang dan Rendah <i>Mutual Adjustment</i>	46
Tabel 5.9	Skor Perbandingan Kategori Tinggi, Sedang dan Rendah Dimensi <i>Mutual Adjustment</i> di Dishub dan Diskominfo.....	47
Tabel 5.10	Distribusi Frekuensi <i>Direct Supervision</i>	48
Tabel 5.11	Skor Kategori Tinggi, Sedang dan Rendah Dimensi <i>Direct Supervision</i>	50
Tabel 5.12	Skor Perbandingan Kategori Tinggi, Sedang dan Rendah Dimensi <i>Mutual Adjustment</i> di Dishub dan Diskominfo.....	50
Tabel 5.13	Distribusi Frekuensi <i>Standardization Of Work Processes</i>	51
Tabel 5.14	Skor Kategori Tinggi, Sedang dan Rendah <i>Standardization Of Work Processes</i>	54
Tabel 5.15	Skor Perbandingan Kategori Tinggi, Sedang dan Rendah Dimensi <i>Standardization Of Work</i> di Dishub dan Diskominfo	54
Tabel 5.16	Distribusi Frekuensi <i>Standardization of Work Outputs</i>	55
Tabel 5.17	Skor Kategori Tinggi, Sedang dan Rendah <i>Standardization of Work Outputs</i>	57

Tabel 5.18	Skor Perbandingan Kategori Tinggi, Sedang dan Rendah Dimensi <i>Standardization Of Work Outputs</i> di Dishub dan Diskominfo	58
Tabel 5.19	Distribusi Frekuensi <i>Standardization Of Worker Skills</i>	59
Tabel 5.20	Skor Kategori Tinggi, Sedang dan Rendah <i>Standardization Of Worker Skills</i>	61
Tabel 5.21	Skor Perbandingan Kategori Tinggi, Sedang dan Rendah Dimensi <i>Standardization Of Worker Skills</i> di Dishub dan Diskominfo	62
Tabel 5.22	Skor Kategori Tinggi, Sedang dan Rendah Pada Mekanisme Koordinasi	63
Tabel 5.23	Distribusi Frekuensi Mekanisme Koordinasi	63
Tabel 5.24	Skor Kategori Perbandingan Tinggi, Sedang dan Rendah Mekanisme Koordinasi di DISHUB dan DISKOMINFO.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Di era globalisasi, permintaan masyarakat akan pelayanan publik kian meningkat hal itu pun bersangkutan sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang meningkat juga. Masyarakat ingin pelayanan yang mudah didapat dan juga tidak melalui proses yang rumit. Hal ini pun menjadi pemicu bagi organisasi publik untuk membuat program pelayanan publik menjadi lebih efektif dan juga oleh sebab itu pemerintah pusat, atau pun daerah berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi baru untuk memperbaiki proses pelayanan yang masih menggunakan cara tradisional.

Dalam pembuatan pelayanan tersebut terdapat organisasi publik yang bergerak sendiri, ataupun organisasi publik yang bekerja sama dengan organisasi publik lainnya untuk membuat sebuah pelayanan publik. Hubungan yang terbentuk tersebut dinamakan dengan koordinasi. Koordinasi merupakan salah satu aspek yang penting, dimana adanya kerjasama antar aktor penting didalamnya untuk menggapai dan mewujudkan satu tujuan bersama. Koordinasi atau integrasi dimaksudkan agar tugas-tugas dilaksanakan dan sumber-sumber digunakan secara efektif dan secara efisien¹. Lalu dikatakan bahwa, koordinasi ialah menyatukan seluruh usaha pengorganisasian oleh manajer dan memastikan bahwa proses pengorganisasi menyumbang bagi pencapaian tujuan-tujuan

¹ U. Silalahi, *Asas-Asas Manajemen* (Bandung : PT. Refika Aditama,2011), 217.

organisasional².

Diperlukannya koordinasi juga untuk mewujudkan kreativitas baru dari para manajer publik untuk membuat suatu tujuan bersama karena bagaimanapun sebuah program akan berjalan lancar ketika adanya banyak ide yang disumbangkan dan juga Kemajuan pengembangan kreativitas setiap pemerintah daerah dalam mendukung upaya pelayanan masyarakat adalah salah satu kunci keberhasilan dari perwujudan program-program pendukung pelayanan publik. Adanya jalur komunikasi yang tepat dalam melakukan koordinasi juga merupakan salah satu aspek untuk menguatkan hubungan antara departemen atau antar instansi yang terlibat.

Hal tersebut pun dikarenakan keberhasilan didalam suatu organisasi juga dilihat dari bagaimana cara suatu organisasi atau departemen dan instansi untuk saling melakukan koordinasi. Sebagaimana Organisasi adalah kelompok orang yang berusaha dalam bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama atas dasar pembagian kerja, pengelompokan kerja, distribusi otoritas dan koordinasi³ dan juga Organisasi merupakan sarana bagi kerja sama yang efektif dan efisien orang yang bekerja dalam organisasi dapat menjadi lebih produktif dan efisien daripada orang bekerja sendirian⁴. Kerjasama kelompok atau administrasi ini timbul didorong oleh keperluan orang untuk saling membantu, saling mengisi, karena pada dasarnya orang perorangan akan lebih sulit mencapai apa yang

² J. A. Pearce II, B. Richard, dan Jr. Robinson, *Management*, (Singapore : McGraw-Hill, Inc., 1989), 296 dikutip oleh U. Silalahi, *Asas-Asas Manajemen* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2011), 217.

³ B. Scanlan and B. Keys, *Management and Organizational behavior*, Second Edition (Australia : John Wiley & Sons, 1983) 324.

⁴ U. Silalahi, *Op.cit.*, 2011, 404

dikehendaknya disebabkan oleh keterbatasan–keterbatasan yang ada pada dirinya⁵. Bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pemerintahan di Daerah bagi terwujudnya keserasian serta keberhasilan pembangunan, dipandang perlu memantapkan pengaturan tentang penyelenggaraan koordinasi kegiatan semua Instansi Vertikal dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah, Seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah⁶

Penjelasan mengenai koordinasi tersebut pun akan menuntun kepada ruang lingkup yang lebih sempit dari koordinasi yaitu mengenai mekanisme koordinasi. Mekanisme koordinasi ini sendiri merupakan sub-sistem dari sistem sosial yang mengkoordinasikan aktifitas dari setiap per-orang atau organisasi didalamnya⁷. Maka dari itu untuk memahami mekanisme koordinasi maka akan digunakan 5 dimensi dasar menurut *Henry Mintzberg* yaitu *direct supervision, standardization of work process, standardization of skills, standardization of output, dan mutual adjustment*⁸.

Melihat dari penjelasan mengenai koordinasi dan pelayanan masyarakat program *Bandung Smart City* adalah salah satu contoh dari program yang diusung oleh pemerintah daerah Kota Bandung untuk membuat suatu pelayanan yang didalamnya ikut terkait beberapa dinas. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung mengusung program *Bandung Smart City* dalam rangka memperkuat

⁵ D. Sugandha, *KOORDINASI alat Pemersatu Gerak Administrasi*,(Jakarta : INTERMEDIA,1999), 4.

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah

⁷ J. Kornai, (ed.) *The Socialist System: The Political Economy Of Communism*(New York : Oxford University Press Inc, 1992), 91.

⁸ H. Mintzberg, *Structure in Fives Designing Effective Organizations* (New Jersey : Prentice-Hall, 1993), 4-6.

reputasi pertumbuhannya sebagai salah satu kota teknologi di Indonesia. Penggunaan *smart city* ini sendiri dengan menggunakan sistem ICT yaitu *information And Communication Technology* untuk menghubungkan, memonitori dan mengontrol yang ada di kota secara efektif dan efisien dalam rangka memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat⁹. Dalam hal ini Kota Bandung berpedoman kepada Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 08 Tahun 2008 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung 2005-2025, yang telah menetapkan pembangunan Kota Bandung Tahun 2005-2025, yaitu “ Kota Bandung Bermartabat” (*Bandung Dignified City*) dan sinkronisasi visi dan misi Kota Bandung tersebut dengan rencana pembangunan *Smart City* Kota Bandung terbagu dalam enam dimensi smart city yaitu, *Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society* dan *Smart Environment*.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menjadi salah satu pemegang kendali utama tetapi mereka juga memerlukan kerja sama serta koordinasi dengan dinas atau instansi lainnya dalam proses mewujudkan *Bandung Smart City*. *Bandung Smart City* memiliki visi yaitu “ didasarkan pada perusahaan teknologi yang menarik atau yang sedang tumbuh, dan ini adalah tujuan yang sangat kompetitif karena banyak kota di seluruh dunia berlomba – lomba untuk hal yang sama yaitu orang – orang dan pekerjaan yang sangat *mobile*¹⁰. Manfaat dari teknologi yang cerdas adalah integrasi semua bidang dan Bandung bekerja

⁹ R. Kamil, ‘Bandung Smart City.’

<https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/12659kamil.pdf>

¹⁰ Y, Suyono, ‘Bandung Smart City.’

http://www.siemens.asia/ID/Libraries/Press_Attachment/Bandung_Study_Book_ID.sflb.ashx (2016).

untuk mengembangkan program dan kebijakan pada bidang – bidang inti yaitu Pemerintahan, Transportasi, Energi/Smart Grid, Lingkungan Hidup, Keuangan, Pendidikan, Kesehatan, Keamanan, Pembangunan Masyarakat, Perdagangan dan Bisnis.

Keterlibatan akan dinas-dinas dalam mewujudkan *Bandung Smart City* juga menjadi salah satu alasan aspek koordinasi ini diteliti oleh sang peneliti. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kepegawaian Penduduk dan Pelatihan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertahanan dan Pertamanan, Dinas Tata Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, PD BPR, Dinas Kesehatan, RSUD Kota Bandung, RSKIA Kota Bandung, RSKGM Kota Bandung, Dinas Perhubungan, Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Dinas Pendidikan¹¹ merupakan dinas-dinas yang bekerja sama dalam mensukseskan program *Bandung Smart City*.

Keterkaitan dengan dinas-dinas diatas tentu akan memunculkan tantangan masing-masing yang akan dihadapi untuk kedepannya, salah satu tantangan tersebut adalah bagaimana mekanisme koordinasi yang terkait dengan upaya mewujudkan *Bandung Smart City*. Masalah klasik yang sering dihadapi terutama pada sektor pemerintah yang seharusnya diperlukannya koordinasi yang baik sehingga setiap elemen yang berpartisipasi dan berkolaborasi di dalam

¹¹ Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung ‘Buku II masterplan BSC.’ <https://smartcity.bandung.go.id/smartcity/eksternal/show/129>.

pembangunan dan mewujudkan *Bandung Smart City* bisa memberikan kontribusi yang maksimal. Pada sesi wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai bagaimana koordinasi Dinas komunikasi dan Informatika dengan dinas-dinas lainnya, Bapak Fatur selaku bagian dari data dari Dinas Komunikasi dan Informatik menyebutkan bahwa¹²:

“jadi program ini tidak hanya diskominfo saja jadi ada banyak kerja sama dengan dinas-dinas lainnya...kami tentu mengalami kesulitan terlebih jika didalam suatu dinas tersebut tidak adanya bagian bank data yang berguna untuk mengumpulkan data, karena banyak program yang kami lakukan memerlukan data yang akurat tapi kalau datanya tidak lengkap kan jadi susah terlebih data-data tersebut berasalnya dari dinas-dinas lain karena kami kan juga memiliki keterbatasan maka dari itu ikut campur kesadaran akan data itu sangat penting kalau tidak nanti datanya kan tidak lengkap dan tidak valid ...”

Dari hasil wawancara tersebut bisa diketahui bahwa adanya ketidak sadaran akan pentingnya data dari beberapa dinas yang bekerja sama dalam program *Bandung Smart City* dan hal tersebut memberikan dampak untuk kedepannya dan ada beberapa implikasi lainnya yang terjadi berdasarkan dari standar mekanisme koordinasi yang dikemukakan oleh Henry Mintzberg, yang diketahui melalui sesi wawancara seperti berikut ini:

“...kita memang nggak ada kalo satu individu yang bertanggung jawab langsung terhadap Bandung Smart City, karena smart city ini kan bukan program yang baru/dimasukan ditengah jalan proses pemerintahan tapi juga dimasukan

¹² Hasil Wawancara dengan Bagian dari data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, 25 september 2018.

kedalam RPJMD dan banyak dinas yang ikut terlibat juga sehingga kurang pas aja kalo dibebankan pada 1 organisasi bahkan 1 orang”¹³

Selain itu, wawancara yang dilakukan ini bapak Fatur pun menyebutkan beberapa hal lain terkait dengan bagaimana cara Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan tugasnya didalam program *Bandung Smart City* yang membawa kepada beberapa implikasi terkait dengan dimensi-dimensi yang dikemukakan oleh Henry Mintzberg, yaitu :

“...meeting sector masih di Diskominfo ya walaupun banyak dinas yang terkait,dan terkait dengan evaluasi dan monitoring juga dipantau oleh kepala bidang kalo saya kan bagian data maka saya dipantau oleh kepala bidang,....dari awal pun kita nggak ada pelatihan khusus untuk Smart City ini jadi dari bagian dinas hanya menyesuaikan saja,”¹⁴

Dari hasil sesi wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, kita dapat melihat bahwa yang adanya beberapa implikasi yang tidak sesuai yang terjadi dalam koordinasi yang dimana ha ini berpengaruh kepada mekanisme koordinasi yang akan diteliti dan dengan engan acuan oleh 5 dimensi yang akan digunakan untuk meneliti mekanisme koordinasi terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perhubungan baik itu dari segi komunikasi hingga cara setiap pegawai mencapai tujuan bersama.

Mencermati masalah diatas menurut peneliti, masalah sebenarnya bukan semata – mata pada kelembagaan atau badan untuk koordinasi tetapi lebih kepada

¹³ Hasil Wawancara dengan Bagian dari data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, 25 september 2018.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bagian dari data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, 25 september 2018.

terletak pada para lembaga terkait dengan pengelolaan *Bandung Smart City* untuk berkoordinasi secara khusus. Sebab ini untuk kepentingan menyusun proposal penelitian, penulis tertarik meneliti “ **Mekanisme Koordinasi Antara Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandung Dengan Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Mewujudkan *Bandung Smart City***”

1.2 Rumusan Masalah

Dengan berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mekanisme koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mewujudkan “*Bandung Smart City*”?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mewujudkan *Bandung Smart City*

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat referensi terutama yang berkaitan dengan koordinasi dan mekanisme koordinasi, dan menambah informasi dan pengetahuan mengenai koordinasi bagi dinas-dinas yang bersangkutan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian dapat dijadikan bahan untuk mengetahui bagaimana mekanisme koordinasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mewujudkan *Bandung Smart City*.